

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SEMARANG SEBAGAI WORLD HERITAGE SITE VERSI UNESCO

Salsabilla Alya Putri

Email : salsabilaalv2@gmail.com

Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M. Pol.Admin, Ph.D

Email : budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

Hendra Try Ardianto, S.IP, MA

Email : hendratrya@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil dari implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang yang terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III dan menggunakan indikator-indikator sebagai tolak ukur pencapaian dalam situs warisan dunia UNESCO. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif disertai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil survei menunjukkan bahwa renovasi berkelanjutan di Kota Lama Semarang telah menghasilkan banyak perubahan baik pada lingkungan maupun pada bangunannya. Menurut prakiraan, pada tahun 2020 silam Kota Lama Semarang akan masuk dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO, namun pada kenyataannya baru selesai di pertengahan tahun 2021. Revitalisasi Kota Lama Semarang dilakukan dalam dua tahap pada tahun 2017 dan 2020. Tidak ada kendala besar dalam revitalisasi Kota Lama, semuanya berjalan dengan lancar.

Kata kunci : Implementasi, Revitalisasi, UNESCO

**IMPLEMENTATION OF THE POLICY FOR THE REVITALIZATION OF THE OLD CITY OF
SEMARANG AS A UNESCO VERSION OF WORLD HERITAGE SITE**

Salsabilla Alya Putri

Email : salsabilaalyap2@gmail.com

Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M. Pol.Admin, Ph.D

Email : budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

Hendra Try Ardianto, S.IP, MA

Email : hendratrya@gmail.com

**Department of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code: 1296
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the results of the implementation of the revitalization policy of the Old City of Semarang which is registered as a UNESCO World Heritage Site. To analyze this, this study uses variables such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The theory used in this research is the implementation of public policy from George C. Edwards III and uses indicators as a benchmark for achievement in UNESCO world heritage sites. This study uses a qualitative descriptive method accompanied by data collection methods conducted through interviews, observation, and documentation. The survey results show that continuous renovations in the Old City of Semarang have resulted in many changes both in the environment and in the buildings. According to forecasts, in 2020 the Old City of Semarang will be included in the UNESCO World Heritage List, but in reality it will only be completed in the middle of 2021. The revitalization of the Old City of Semarang is carried out in two stages in 2017 and 2020. There are no major obstacles in revitalizing the Old City, everything runs smoothly.

Keywords : Implementation, Revitalization, UNESCO

A. PENDAHULUAN

Kota Lama termasuk dalam pusaka yang dimiliki oleh Kota Semarang. Pada jaman dahulu, sekitar kawasan ini dialih fungsikan sebagai pusat perkantoran, perdangan, bahkan pemerintahan semuanya dilakukan di kawasan ini. Kota Lama ini pada jaman dahulu berfungsi sebagai pusat Kota Semarang sehingga memiliki berbagai macam gedung yang bernilai sejarah. Sayangnya pada saat ini beberapa bangunan tersebut justru tak berfungsi dengan optimal. Walaupun demikian, saat ini masih terdapat beberapa gedung peninggalan Belanda yang terlihat kokoh berdiri hingga sekarang, diantaranya yaitu Gereja GPIB Immanuel (Gereja Blenduk), Gedung Marabunta, Stasiun Tawang, Pabrik Rokok “Praoe Layar” Jembatan Berok, serta bangunan-bangunan peninggalan Belanda lainnya yang masih banyak tersebar di kawasan ini. Sebagai pusat kota pada masa lalu, kawasan ini berfungsi sebagai tempat tinggal penduduk Belanda dan Eropa lainnya, serta etnis Tionghoa yang rata-rata memiliki profesi sebagai pedagang. Akan tetapi karena lama tidak difungsikan, maka pada saat ini beberapa lokasi kawasan Kota Lama dimanfaatkan secara ilegal oleh gelandangan. Sementara beberapa lokasi lain digunakan menjadi fasilitas pergudangan (Mangihut et al., 2014).

Sebelum terbitnya SK Walikota Semarang Nomor 6/50/1992 tentang Pelestarian Bangunan Tua/Bersejarah Di Kawasan Kota Lama Semarang, UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, 1992*). Sejak saat itu, Kota Semarang mulai bertindak melestarikan bangunan bersejarah dengan menyusun daftar bangunan yang termasuk dalam bangunan cagar budaya. Dengan berlakunya undang-undang tentang Pelestarian Benda Cagar Budaya, undang-undang tersebut selanjutnya disempurnakan menjadi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, 2010*).

Penelitian terdahulu terkait revitalisasi Kota Lama Semarang yaitu oleh (Dewantara, G. A. H., & Astuti, 2017) penelitian tersebut menganalisis bagaimana implementasi kebijakan program revitalisasi Kota Lama sebagai kawasan wisata di Kota Semarang, serta mencari faktor pendorong dan penghambat kegiatan revitalisasi. Penelitian yang dilakukan kala itu dirasa sudah baik, namun semuanya tidak dilakukan secara maksimal karena masih dalam proses pengerjaan sebagai Tujuan Pariwisata pada tahun 2020. Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh (Puspitasari & Khasana Ramli, 2018) dalam penelitian ini ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Kota Lama Semarang ketika masuk dalam daftar Pusaka Dunia di tahun 2018, dimana pada saat itu sedang berproses untuk mengajukan persyaratan sebagai World Heritage Site. Luaran riset ini yaitu adanya beberapa indikator yang berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan Kota Lama.

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi pada riset ini antara lain: 1) **Kelancaran Komunikasi**, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan ke masyarakat sekitar yaitu dengan memberikan edukasi kepada warga sekitar mengenai pentingnya melestarikan lingkungan dan bangunan. Tak hanya dengan masyarakat sekitar saja, komunikasi antar pemilik usaha dengan lembaga pemerintah mengenai perubahan bentuk bangunan pun juga dilakukan dengan baik agar masih sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya. 2) **SDM dan infrastruktur** yang memadai dalam berjalannya kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang, walaupun sempat tersendat akibat masuknya Virus Covid-19 namun kebijakan yang dimulai sejak tahun 2017 berjalan dengan lancar dan selesai pada tahun 2021; 3) **Disposisi** yang tepat sasaran dalam pelestarian revitalisasi Kota Lama, dimana penataan tugas dari aparatur pemerintahan yang telah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, serta keahliannya sehingga pekerjaan dalam revitalisasi tak banyak mengalami kendala; 4) **Struktur birokrasi** dengan standar minimal yang

dipersyaratkan telah beroperasi dengan baik, serta besarnya dukungan yang diberikan oleh masyarakat sekitar kawasan Kota Lama dalam ikut mencanangkan agenda pariwisata yang diselenggarakan Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Adanya latar belakang tersebut membuat peneliti memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang yang dilihat memiliki konsep *The World Heritage* versi UNESCO pada tahun 2020?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini guna menginformasikan tentang bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Semarang yang digadang-gadang berkonsep *The World Heritage*, versi UNESCO.

C. TINJAUAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1992), “Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Menurut Dye, jika pemerintah berniat melakukan sesuatu, pekerjaan tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan dibaliknya, hal tersebut dikarenakan kebijakan publik adalah “tindakan” pemerintah. Jika pihak pemerintah membuat keputusan untuk tidak menjalankan sesuatu, maka hal tersebut merupakan kebijakan publik yang dibalik itu semua pasti memiliki suatu tujuan. James E. Anderson Anderson (1970) menyatakan, "Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat

pemerintah".(Anggara, 2014). Terdapat 4 variabel sebagai indikator tolak ukur keberhasilan dalam menurut Edwards III, yaitu:

1) **Komunikasi** memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik (Bima Bayu Aji, n.d.). Sebuah kebijakan perlu adanya suatu proses komunikasi yang dibangun agar implemementasi kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tiga cara yang digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan kesuksesan dalam berkomunikasi:

a) **Transmisi**, Komunikasi yang baik juga dapat memberikan *output* yang baik. Kejadian yang biasanya terjadi adalah kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya.

b) **Kejelasan**, Pesan yang diterima pembuat kebijakan (kantor jalanan) harus jelas dan tidak menyesatkan, dan pesan politik yang tidak jelas tidak harus selalu menghambat implementasi. Pada tingkat tertentu, pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan memerlukan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan.

c) **Konsistensi**, Pemberian perintah untuk komunikasi harus konsisten, tidak ambigu, sehingga dapat ditulis atau dieksekusi. Ini karena sering terjadi perubahan pada perintah yang diberikan sehingga dapat membingungkan mereka yang ada di tempat kejadian.

2) **Sumber daya** untuk implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, keuangan, dan material. Ini tentang orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya, termasuk kualitas, kuantitas dan kekuatan. Oleh karena itu, sumber daya dalam hal ini merupakan faktor

penting lainnya dalam penegakan kebijakan. Menurut Edward III, Indikator keberhasilan dalam Sumber daya meliputi:

- a) **Staf**, Sumber daya utama untuk implementasi kebijakan adalah manusia. Salah satu kesalahan umum dalam penegakan kebijakan adalah adanya staf yang tidak kompeten di bidang yang bersangkutan.
 - b) **Informasi**, informasi selama implementasi kebijakan, informasi dibagi menjadi dua bagian: pertama informasi tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Kontraktor perlu mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menerima pesanan. Kedua, informasi tentang data kepatuhan dari peraturan pemerintah dan petugas kepatuhan. Penegak hukum harus diberitahu apakah mereka yang terlibat dalam penegakan kebijakan mematuhi hukum.
 - c) **Otoritas**, Secara umum, otoritas harus formal untuk melakukan perintah. Otoritas adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditentukan secara politik. Ketika kekuasaan nol, pelaksanaan kekuasaan tidak dibenarkan di mata publik, yang dapat menghambat implementasi kebijakan.
 - d) **Fasilitas**, Kenyamanan merupakan salah satu indikator penting implementasi kebijakan. Penegak dapat diberdayakan untuk memiliki staf yang cukup, memahami pekerjaan yang harus dilakukan, dan melakukan tugasnya. Namun, kebijakan yang dilaksanakan tanpa dukungan (infrastruktur) tidak akan berhasil.
- 3) **Disposisi** adalah sikap dan kemauan orang yang mengimplementasikan kebijakan yang akan dilaksanakan, agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif sehingga

tidak terjadi bias dalam pelaksanaannya. Beberapa pertimbangan penting mengenai variabel pembuangan adalah:

- a) Regulasi Birokrasi dalam konteks ini, Edwards III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan juga harus dilihat dari perspektif regulasi yang penting. Pengangkatan PNS dalam lembaga fungsional merupakan perpaduan antara kemampuan, kemampuan dan keberanian.
- b) Edward mengatakan bahwa salah satu metode yang diusulkan untuk memecahkan masalah kecenderungan penegakan hukum adalah manipulasi persuasi. Akibatnya, orang sering bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri, memanipulasi motivasi pembuat keputusan untuk mempengaruhi perilaku mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan.

4) **Struktur Birokrasi**, keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu ada dalam struktur birokrasi. Bahkan jika memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, atau pembuat kebijakan tahu apa yang harus dilakukan hingga ingin menerapkan suatu kebijakan, suatu kebijakan mungkin tidak dapat diimplementasikan karena kurangnya struktur administratif. Edward III menyatakan, terdapat dua karakteristik yang bisa meningkatkan kinerja dalam struktur organisasi, antara lain:

- a) Melakukan kegiatan sehari-hari setakar dengan SOP yang dipersyaratkan.
- b) Fragmentasi merupakan metode pembagian kewajiban atas tindakan, atau tindakan karyawan di beberapa unit kerja.

2. The World Heritage

Situs Warisan Dunia UNESCO adalah program Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan memelihara warisan budaya dan alam dunia. Maka dari itu, merupakan tanggung jawab masyarakat global dalam melindungi dan menjaga Warisan Dunia agar sejarahnya dapat terus dipelajari. Penetapan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO bukanlah suatu kebetulan, dan program tersebut didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia yang dicetuskan oleh UNESCO pada tahun 1972 (Sari et al., 2017). Tentu saja, tujuan khusus dari program ini ditujukan untuk:

- a) Menyerukan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk menandatangani Konvensi Warisan Dunia dan melindungi warisan budaya dan alam mereka.
- b) Menyerukan Negara Anggota untuk mengembangkan dan menyiapkan laporan tentang konservasi Situs Warisan Dunia.
- c) Meminta Negara Pihak pada Konvensi untuk mendaftarkan warisan wilayah mereka untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia.
- d) Memberikan bantuan keamanan kepada Negara-negara Anggota dalam menjaga warisan alam dan budaya melalui pelatihan.
- e) Memberikan bantuan mendesak ke situs Warisan Dunia jika terjadi bahaya
- f) Mendukung kegiatan kesadaran publik Negara-negara Anggota untuk konservasi Warisan Dunia
- g) Mendorong masyarakat untuk konservasi warisan budaya dan alam
- h) Mendorong kerjasama untuk penunjukan UNESCO dan pengakuan Kota Warisan Dunia (Abi, n.d.).

Sebuah kota harus memenuhi 1 (satu) atau 10 atau lebih kriteria Special Universal Value (OUV) yang dikeluarkan UNESCO (Centre, 2012):

1. *A Masterpiece of Human Creative Mind*
2. Nilai-nilai luhur kemanusiaan dari waktu ke waktu atau sebagai bagian dari budaya dunia dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, tata kota atau lanskap pertunjukan;
3. Mengambil peran sebagai sisa yang unik atau unik dari tradisi atau peradaban budaya yang hilang atau masih ada;
4. Contoh sempurna dari sebuah bangunan, elemen arsitektur atau teknologi atau tipe lanskap yang mewakili babak penting dalam sejarah manusia.
5. Pemanfaatan darat atau laut sebagai contoh permukiman tradisional manusia merupakan interaksi manusia dengan budaya atau lingkungan.
6. Referensi langsung atau tidak langsung ke peristiwa, tradisi hidup, ide, kepercayaan, karya seni dan sastra yang menarik minat publik, terutama jika lingkungan rentan terhadap efek perubahan;
7. Fenomena alam yang tidak biasa atau kawasan dengan keindahan alam dan estetika yang khusus dan penting;
8. Sebagai contoh yang sangat baik dari tahap kunci dalam sejarah perkembangan Bumi, termasuk sejarah kehidupan, proses geologis yang signifikan terjadi dalam perkembangan bentang alam.
9. Merupakan contoh yang luar biasa dari proses ekologi dan biologis penting dalam evolusi dan perkembangan ekosistem darat, air tawar, pesisir dan laut, serta bioma flora dan fauna;

10. Warisan dengan nilai universal atau luar biasa yang luar biasa harus memenuhi persyaratan integritas atau keaslian dan memiliki sistem pengelolaan dan pengamanan untuk memastikan keberlanjutan di masa depan.

Outstanding Universal Values (OUV) merupakan salah satu syarat yang dicetuskan oleh UNESCO untuk menetapkan Situs Warisan Dunia. Untuk menjadi Situs Warisan Dunia, sebuah monumen wajib melengkapi persyaratan sistem perlindungan (konservasi) dan pengelolaan yang menjamin integritas, keaslian, dan keberlanjutannya.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, proses dan pemaknaannya lebih terfokus pada penelitian kualitatif dan landasan teori yang digunakan dengan pedoman fokus penelitian sampai sama dengan kenyataan di lokasi penelitian. Kerangka teoritis juga memberikan gambaran tentang kerangka penelitian dan berguna sebagai bukti untuk membahas temuan penelitian. Terkait dengan data kualitatif, peneliti mencari informasi mengenai implementasi kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang yang diprediksi berkonsep *The World Heritage* pada tahun 2020. Penggunaan pendekatan kualitatif dapat menjawab rumusan masalah pertama mengenai alur kebijakan dalam proses revitalisasi Kota Lama Semarang.

E. HASIL PENELITIAN

1.1 Analisis Implementasi Revitalisasi Kota Lama Semarang

Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan proyek regenerasi Kota Lama Semarang dengan membaginya menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap perlindungan, dan sebagai situs sejarah, Kota Lama dengan bangunan tua

harus mendapat manfaat hukum dan materi. Perlindungan tingkat kedua adalah konservasi atau pembangunan. Revitalisasi dilakukan di Kawasan Lama Semarang, pada tahun 2020 hanya ada 2 tahap yaitu tahap pertama fokus pada infrastruktur dan yang kedua fokus membangun landmark baru berupa museum. Kebangkitan tahap pertama dinilai cukup berhasil karena dapat mengembalikan lingkungan, dan secara ekonomi banyak bangunan yang dibangun dan diubah menjadi tempat umum seperti restoran, kafe, dll.

A. KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH LANCAR, NAMUN UNTUK SEBALIKNYA BELUM

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, edukasi-edukasi mengenai pemeliharaan kawasan cagar budaya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah atau sukarelawan yang bergerak dalam pengelolaan kawasan Kota Lama kepada masyarakat sekitar. Edukasi yang dilakukan biasanya terjadi di lingkungan Pasar Johar yaitu dengan mengedukasi kepada pedagang kaki lima yang sedang berjualan ikan segar misalnya, bahwa kelembaban air, pembuangan kotoran limbah ikan itu sangat berdampak buruk dengan keberadaan cagar budaya disekitar kawasan tersebut. Tak hanya menjaga kebersihan lingkungan saja, namun mengedukasi warga sekitar mengenai pemeliharaan bangunan cagar budaya di kawasan Kota Lama pun juga telah dilakukan, hal ini dilakukan mengingat kerap terjadinya aksi vandalisme pun juga kerap terjadi di kawasan Kota Lama tersebut. Seperti pencurian penutup saluran air, pencurian tong sampah, dan aksi vandalisme lainnya. Pentingnya menjalin suatu transmisi dalam sebuah komunikasi antara satu dengan yang lainnya demi kelancaran suatu kebijakan yang telah dijalankan, mengingat kebijakan inilah yang menjadi tujuan

bersama demi memajukan Kota Semarang menuju situs warisan dunia versi UNESCO. Kesadaran dari masyarakatlah yang nantinya akan memberikan dampak yang lebih baik ketika revitalisasi Kota Lama tersebut dijalankan. Apabila hal tersebut sudah dilakukan, maka hingga saat ini tidak ada yang namanya pencurian besi penutup saluran air, pencurian tong sampah disekitar kawasan Kota Tua Semarang.

Merenovasi bangunan di kawasan Kota Lama juga tidak dilakukan secara sembarangan, mengingat semua ada kejelasan dalam aturan dan kaidahnya dalam pelestarian bangunan cagar budaya yang mana keseluruhannya dipegang oleh TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) dan BPK2L (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama). Hal tersebut juga berlaku ketika akan mengajukan perijinan penggunaan bangunan kuno di kawasan Kota Lama Semarang untuk menjadikannya sebuah usaha Makro seperti coffe shop, resto, penginapan, dll. Luaran dari riset ini dinilai tidak banyak kendala terkait soal perijinan penggunaan bangunan-bangunan disekitar kawasan tersebut, asalkan semuanya telah berjalan sesuai dengan kaidah Kawasan Kota Lama dan memenuhi syarat administrasi, perijinan tersebut akan segera diproses.

Konsistensi pemerintah dalam revitalisasi Kota Lama 2017 hingga 2021, Kota Lama Semarang berhasil dihidupkan kembali. Rekonstruksi Kota Lama Semarang dimulai sejak 2017 dengan dukungan Pemkot melalui Kementerian Perumahan Rakyat, yang membantu Walikota Semarang dimana banyak membawa perubahan pada nilai historisnya. Kebangkitan ini dibarengi dengan pemanfaatan gedung-gedung tua di Kota Lama Semarang sebagai kawasan ekonomi dan komersial. Bangunan yang digunakan sebagai perkantoran, restoran, kafe, dan tempat tujuan wisata jauh dari permukiman kumuh dan rawan kejahatan. Gedung lainnya juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota

Semarang sebagai galeri seni dan showroom produk UMKM untuk lebih memamerkan potensi UMKM Semarang kepada pengunjung Kota Lama Semarang sebagai kawasan ekonomi dan komersial. Bangunan yang digunakan sebagai perkantoran, restoran, kafe, dan tempat tujuan wisata jauh dari permukiman kumuh dan rawan kejahatan. Selain itu, Pemkot Semarang memanfaatkan gedung lainnya sebagai galeri seni dan *showroom* produk UMKM untuk lebih menampilkan potensi UMKM Semarang kepada pengunjung Kota Lama.

B. SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR YANG TERSEDIA

Rekonstruksi kawasan Kota Lama harus diawasi oleh Kementrain PUPR, Dirjen Cipta Karya, BPK2L dan Dinas Pariwisata untuk meminimalisir kesalahpahaman selama pembangunan. Ketika sebuah kebijakan itu dibuat, biasanya beban pekerjaan akan semakin bertambah. Pada kenyataannya baik dari BPK2L maupun Dinas Pariwisata tidak banyak kendala dalam berjalannya proses revitalisasi. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam pelaksanaan revitalisasi Kota Lama Semarang sangatlah penting. Dimana hal inilah yang akan membawa dampak ketika revitalisasi tersebut dijalankan, mulai dari kinerja stafnya, persediaan bahan bangunan yang sempat tersendat dikarenakan pandemic Covid-19, serta kinerja rumah pompa dalam menanggulangi banjir ketika datang melada kawasan Kota Lama Semarang.

Pemerintah Kota Semarang telah membangun dua polder kecil di kawasan Kota Lama, tepatnya di eks Taman Bubakan dan di sekitar Jembatan Berok. Kedua polder mini tersebut dibangun sebagai upaya Pemerintah Kota Semarang untuk menangani banjir dan gelombang pasang di kawasan Kota Lama. Mengingat Kota lama adalah

kawasan rawan banjir. Rumah pompa di Kota Lama saat ini berfungsi dengan baik ketika banjir tiba-tiba melanda daerah tersebut. Rumah Pompa dibangun dengan dalih banjir tidak lagi menjadi masalah besar di kawasan Kota Tua. Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran banjir tidak begitu menjadi kendala dalam keberlangsungan revitalisasi Kota Lama Semarang, hal ini dikarenakan banjir merupakan kendala yang dapat dengan cepat teratasi dengan kehadiran rumah pompa dan system drainase yang telah dibangun oleh kementrian PUPR yang mana cara mengatasinya pun hanya membutuhkan waktu satu malam saja bencana banjir sudah dapat teratasi. Namun untuk kedepannya, memperhatikan kondisi gorong-gorong di Kota Lama Semarang juga sangat penting, apabila dengan gorong-gorong itu bampet dan menyebabkan sedimentasinya menjadi tinggi, maka bencana banjir akan kembali.

C. DISPOSISI YANG TEPAT SASARAN

Riset menunjukkan banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan kembali kabupaten Semarang lama. Ada tiga pihak utama yang berperan penting: Dinas PUPR, Sekjen Cipta Karya, Dinas Pariwisata Kota Semarang dan BPK2L. Harus ada kesepakatan yang jelas agar masing-masing pemangku kepentingan dapat memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, dan pelaksanaannya harus sinergis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan BPK2L (Otoritas Kota Lama), BPK2L sendiri telah diberikan hak pengelolaan khusus. BPK2L merupakan organisasi tidak terstruktur yang bertanggung jawab langsung kepada walikota. Berdasarkan indikator keberhasilan penataan, khususnya penataan aparatur pemerintahan, yang mengacu pada pengangkatan dan pengangkatan kader di aparatur

pemerintahan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta keahliannya. Implementasi kebijakan revitalisasi Kuartal Lama dinilai memiliki kinerja pegawai yang konsisten dan optimalisasi potensinya dengan baik. Mereka bekerja sama dengan baik untuk dapat menyelesaikan kebangkitan ini. Dari sisi insentif, hal tersebut dipandang tidak menjadi penghambat keberlangsungan pemulihan ini karena mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan konstituennya masing-masing.

Hubungan Antar Organisasi dengan BPK2L sebagai instansi yang memiliki kewenangan khusus untuk mengelola Kota Lama, menghubungi beberapa OPD, masyarakat dan pihak swasta untuk melaksanakan Kebijakan Revitalisasi Kota Lama. Padahal masing-masing OPD sudah memiliki perannya masing-masing, sehingga kita tidak lagi mengandalkan satu OPD saja untuk melaksanakan revitalisasi Kota Lama, kita perlu mengetahui peran masing-masing. Hubungan dengan pihak swasta juga diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) yang dimiliki oleh BPK2L, yang biasanya dibuat pada saat proses perizinan antara pemerintah dengan pihak swasta/investor dan penandatanganan MOU bagi pengusaha . Hubungan yang terjalin antar masing-masing OPD cukup baik dan diatur dengan SOP tersendiri untuk pihak swasta. Di bawah arahan pelaksana kebijakan *Old Town Renaissance*, pemerintah kota telah bekerja untuk memastikan sosialisasi masyarakat, sektor swasta, atau investor, terutama melalui BPK2L dan OPD lainnya. Kami berharap melalui sosialisasi kebijakan kebangkitan ini dapat dipahami dan dirasakan oleh masyarakat, disertai dengan timbal balik dari masyarakat.

D. STRUKTUR BIROKRASI SESUAI DENGAN STANDAR MINIMUM

Saat ini, Kota Lama Semarang menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO. Kawasan ini mengandung segudang nilai sejarah dan budaya disetiap sudut bangunannya. Peran Dinas Pariwisata Semarang dalam mengembangkan Kota Lama sebagai destinasi wisata adalah mengawal dan membuat program sosialisasi Program Revitalisasi Kota Lama Semarang. Jadwal di atas telah diterbitkan oleh DISBUDPAR untuk mendukung pemulihan Kota Lama. Maka dari itu, mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, pihaknya juga bermitra dengan masyarakat sekitar Kota Lama Semarang untuk mendapatkan masukan agar masyarakat sekitar dapat berpartisipasi dalam revitalisasi Kota Lama Semarang sebagai tujuan wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan dan seluruh masyarakat Semarang. Dinas Pariwisata mendukung mereka yang ingin menyelenggarakan acara di Kota Lama Semarang untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Masyarakat merupakan salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan Kota Lama, seiring dengan keindahan kawasan Kota Tua dan jumlah pengunjung yang terus bertambah. Komunitas di kawasan Kota Tua menggelar berbagai acara, sehingga suasana lokal akan semakin semarak. Komunitas-komunitas yang ada tentunya sudah memiliki izin-izin yang sah dari pemerintah kota, sehingga komunitas-komunitas tersebut tetap tertata rapi, tidak saling mengganggu, dan pengunjung dapat dengan nyaman menikmati hiburan dari komunitas masing-masing. Ada banyak jenis komunitas di Kota Lama, dari komunitas kelas bawah hingga komunitas kelas atas. Pedagang swasta yang menawarkan jasa pemotretan dengan properti sepeda yang didesain dengan bunga dan properti, properti Vespa, boneka dan robot dengan karakter

favorit anak-anak, dan hiburan musik dimana pengunjung hanya dapat menikmati semua ini dengan pembayaran sukarela. Kegiatan budaya yang sudah ada dan diminati pengunjung antara lain melukis wajah, pelatihan cara membuat wayang sedot, pelatihan alat musik tradisional (gamelan), pelatihan teknik Dalanga, dan kegiatan Ikatan Akupunktur Angklung (Timur, N. C. B., & Harsasto, 2019).

F. PENUTUP

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan revitalisasi yang diterapkan di Kota Lama Semarang telah banyak membawa perubahan baik segi fisik maupun kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan revitalisasi ini, Kota Lama Semarang kembali hidup dengan pemanfaatan bangunan-bangunan tak berpenghuni menjadi restoran, coffe shop, tempat penginapan. Hal ini menjadikan tujuan dari diadakannya revitalisasi dngan maksud mengembalikan kawasan yang telah mati menjadi hidup kembali dan lebih modern sangat tepat telah terealisasikan dengan baik. Daya ukur keberhasilan dari implementasi revitalisasi Kota Lama tersebut didasari pada indikator-indikator keberhasilan antar alain sebagai berikut;

- 1) Komunikasi, dari hasil penelitian terdapat komunikasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat dimana masyarakat dirasa masih belum bisa menjaga kebersihan lingkungan dan bangunan sekitar. Namun, untuk komunikasi antar pemilik usaha sekitar kawasan kota lama terkait dengan perijinan penggunaan bangunan dirasa tidak banyak mengalami kendala.
- 2) SDM dan Infrastruktur yang memadai dalam berjalannya kebijakan revitalisasi Kota Lama Semarang;
- 3) Disposisi yang tepat sasaran dalam pelestarian revitalisasi kota lama, dimana penataan aparatur pemerintahan yang telah

sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, serta keahliannya sehingga pekerjaan dalam revitalisasi tak banyak mengalami kendala; 4) Struktur Birokrasi dengan standar minimum yang dibutuhkan telah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan SOP yang telah tersedia.

SARAN

Sejatinya yang menjadi kendala utama dalam menghambat berjalannya revitalisasi Kota Lama Semarang yaitu pada masyarakatnya. Mengingat masih banyaknya obyek yang musnah di Kawasan Lama Semarang, maka perlu adanya kesadaran bersama melalui pelatihan, sosialisasi, koordinasi dalam berkomunikasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk turut menjaga dan melestarikan bangunan yang masuk dalam cagar budaya di kawasan Kota Lama. Dengan ini, tidak akan menimbulkan anggapan bahwa kebijakan revitalisasi Kawasan Lama Semarang ditujukan semata-mata untuk pembangunan material dan penghidupan daerah, tetapi lebih kepada kebutuhan bersama. Adanya kondisi tersebut dapat memunculkan sikap inovatif dan kreatif dari aparatur dan masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan Lama Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, F. (n.d.). Apa yang Perlu Kamu Pahami tentang UNESCO World Heritage ? *Phinemo.Com*.
<https://phinemo.com/unesco-world-heritage/>
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Bima Bayu Aji, A. S. (n.d.). IMPLEMENTASI PROGRAM REVITALISASI DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG. *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1–16.
- Centre, W. H. (2012). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention UNITED. In *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* (Issue July).
- Dewantara, G. A. H., & Astuti, P. (2017). Kajian Implementasi Program Revitalisasi Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 1–10.
- Mangihut, gu E., Mangihut, T. E., & , Parfi Khadiyanto2, P. K. (2014). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG PENDAHULUAN Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berw.* 2(2), 4–10.
- Prabowo, B. N., & Harsritanto, B. I. (2018). Kota Lama Semarang Menuju Status Pusaka Dunia Unesco: Apa Itu Status World Heritage? *Modul*, 18(1), 1–3.
<https://doi.org/10.14710/mdl.18.1.2018.51-53>
- Puspitasari, A. Y., & Khasana Ramli, W. O. S. (2018). Masalah Dalam Pengelolaan Kota Lama Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia. *Jurnal Planologi*, 15(1), 96.
<https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i1.2764>
- Sari, S. R., Harani, A. R., & Werdiningsih, H. (2017). Pelestarian Dan Pengembangan Kawasan Kota Lama Sebagai Landasan Budaya Kota Semarang. *Modul*, 17(1), 49.
<https://doi.org/10.14710/mdl.17.1.2017.49-55>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010*. (2010). 54.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992*. (1992). 1–16.